

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Daerah

2.1.1.1 Definisi Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (santoso, 2013). Sesuai dengan Peraturan Menteri No 86 tahun 2017 bahwa pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, Kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, Pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga Kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, Identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang Kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama Mengambil inisiatif

pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah Daerah (beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan Sumberdaya yang ada) harus mampu meanksir potensi setiap sumberdaya Yang diperlukan untuk merancang dan membangun prekonomian daerah (Arsyad, 2010).

Menurut Adam Smith, pembangunan daerah adalah proses pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh peningkatan produktivitas melalui pembagian kerja, akumulasi modal dari tabungan individu, dan peran pasar yang diatur oleh "tangan tak terlihat" (invisible hand). Smith meyakini bahwa pembangunan akan terjadi seiring kemajuan teknologi, yang memungkinkan terjadinya spesialisasi dan efisiensi, serta pertumbuhan penduduk yang memperluas pasar. Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi sejatinya Memiliki 5 tahapan, dimana semuanya harus dilalui secara Berurutan. Mulai dari masa perburuan, masa beternak, masa Bercocok tanam, perdagangan, dan tahap perindustrian. Inti Dari teori Adam Smith menitik beratkan pada upaya Peningkatan produktivitas dan spesialisasi kerja. Di dalam upaya peningkatan produktivitas kerja diperlukan katalis Seperti keterampilan pekerja, penemuan teknologi dan mesin-Mesin produksi yang akan menambah efisiensi pekerjaan. Menurut Todaro pembangunan suatu daerah harus Mencakup tiga inti nilai, yaitu:

1. Ketahanan (sustenance)

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, Pangan, papan, kesehatan dan proteksi)

2. Harga diri (self esteem)

Pembangunan haruslah memanusiakan. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.

3. Kebebasan (Freedom for servitude) Kebebasan bagi individu suatu Negara untuk berpikir, berkembang, Berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2.1.1.2 Tujuan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan Kualitas pelayanan publik dan daya asing Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dikarenakan dengan perencanaan yang tepat pembangunan dapat diarahkan Secara terarah dan berkesinambungan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 86 tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk Memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

2.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

2.1.2.1 Definisi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat dari kata-kata yang membentuknya, yaitu perencanaan, pembangunan, dan daerah. Perencanaan sendiri memiliki sejumlah arti sesuai dengan sudut pandang setiap ahli, salah satunya

adalah perencanaan menurut Sondang P. Siagian (dalam Dianto, 2021), yaitu keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Adisasmita, Raharjo. (2011:22) mendefinisikan perencanaan adalah pengambilan keputusan tentang apa yang akan di kerjakan, kapan mengerjakannya dan bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas. Berarti, Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi: perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pentingnya orientasi holisti dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin kita mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Tetapi dipihak lain adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki tidak memungkinkan pula untuk melakukan proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus. Dalam hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan (Stefly, 2021).

Pada era otonomi daerah, peran pemerintah daerah menjadi sangat luas terutama dalam pelaksanaan pembangunan sedangkan perencanaan pembangunan daerah

diperlukan karena pelaksanaan pembangunan di desentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Beberapa pendapat pakar pembangunan menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi pedoman dan acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (Stefly, 2021)

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Maramis et al., 2021), mengatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

- 1) Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan Yang sering pula disebut tujuan, arah dan prioritas Pembangunan, pada unsur ini perlu ditepakan tujuan rencana.
- 2) Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan Variabel-variabel pembangunan dan implikasinya.
- 3) Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.
- 4) Adanya kebijaksanaan seperti konsistensi dan serasi, seperti Kebijakan fiskal, moneter, anggaran, harga, sektorial dan Pembanguna daerah.
- 5) Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehhatan dan lain-Lain.
- 6) Adanya administrasi pembangunan yang mendukung Pereencanaan dan pelakasanaan pembangunan.

2.1.2.2 Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah menyusun suatu rencana pembangunan yang merupakan pegangan atau acuan Pemerintah Daerah untuk

melaksanakan pembangunannya yang didasarkan pada kemampuan dan potensi sumber daya (alam dan manusia) serta peluang-peluang ekonomi yang ada, sehingga memungkinkan dapat ditangkap secara cepat. Manfaat yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat sehingga menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan daerah dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Daerah yang menetapkan kegiatan-kegiatan pembangunan sosioekonomi, fisik (infrastruktur), yang dilaksanakan secara terpadu oleh sektoral, publik, dan swasta (Arwan, 2020)

2.1.3 Otonomi Daerah

2.1.3.1 Definisi Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Berdasarkan pasal 1 angka 6 UU 23 tahun 2014 Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Era otonomi daerah merupakan titik balik guna memberikan kekelulasaan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun di tengah perkembangan era otonomi daerah ini memberikan peluang untuk daerah membangun daerahnya masing-masing, akan tetapi disatu sisi masih banyak yang belum siap terhadap sistem pemerintahan daerah dan otonomi daerah sehingga menyebabkan daerah yang tertinggal dan melupakan sebuah asas perencanaan dalam pembangunan, oleh karena itu dengan urgennya untuk mengejar ketertinggalan percepatan pembangunan daerah dibutuhkan sebuah perencanaan dan pembangunan. Hal ini lah mendorong Urgensinya perencanaan dalam pembangunan daerah (Saeful, 2020).

Definisi Otonomi Daerah Menurut Para Ahli :

1. Menurut F. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan Wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah.
2. Menurut Syarif Saleh: Otonomi Daerah merupakan hak yang Mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.
3. Menurut Kansil: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta Kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri Sesuai perundang-undangan yang masih berlaku.
4. Menurut Widjaja: Otonomi Daerah merupakan salah satu bentuk Desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk Memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh Dengan upaya yang lebih baik dalam mendekati berbagai tujuan

Penyelenggaraan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita Masyarakat yang adil dan makmur.

5. Menurut Philip Mahwood: Otonomi Daerah merupakan hak dari Masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan serta perlakuan Yang sama, baik dalam hal mengekspresikan, berusaha mempertahankan kepentingan mereka masing-masing dan ikut serta Dalam mengendalikan penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah.

2.1.3.2 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan dari otonomi daerah adalah sebagai berikut ini (Djuniarti, 2023)

1. Meningkatkan Pelayanan Umum

Dengan otonomi daerah diharapkan pelayanan umum lembaga pemerintah di masing-masing daerah dapat ditekankan kemaksimalan pelayanannya. Dengan pelayanan yang maksimal diharapkan masyarakat merasakan secara langsung manfaat otonomi daerah.

2. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

Dengan pelayanan yang memadai diharapkan kesejahteraan masyarakat pada daerah otonom bisa dipercepat. Tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara bijak dan tepat sasaran.

3. Meningkatkan daya saing daerah

Dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Meningkatkan daya saing daerah harus memperhatikan bentuk keanekaragaman dan kekhususan daerah tertentu dan tetap mengacu pada kebinekaan “Bineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

2.1.4 APBD

2.1.4.1 Definisi APBD

Menurut Yuliasati (2017), APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran, baik pendapatan maupun belanja, juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan APBD, pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana Keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD merupakan salah satu instrumen dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di daerah sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah. Selain itu, APBD dapat dijadikan sebagai suatu sarana dalam berkomunikasi kepada masyarakat mengenai besaran serta alokasi pendapatan, Belanja serta pembiayaan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif yaitu DPRD (Wijaya, 2022). Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Dalam konteks belanja, pemerintah

daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan:

1. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
2. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

2.1.4.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD memiliki berbagai fungsi yaitu :

1. Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi berarti APBD merupakan landasan dalam merealisasikan Pendapatan serta belanja pada tahun berkenaan.

2. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan berarti APBD adalah aturan untuk manajemen dalam Perencanaan kegiatan pada tahun berkenaan.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan berarti APBD adalah aturan dalam menilai kesesuaian program pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah berlaku

4. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi berarti APBD harus diarahkan dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta mencegah inefisiensi sumber daya serta meningkatkan efektivitas serta efisiensi perekonomian daerah.

5. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi berarti dalam penyusunan APBD harus mengindahkan rasa Keadilan dan kesusilaan.

6. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi berarti APBD menjadi instrumen dalam menjaga serta Mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.1.4.3 Komponen-komponen APBD

Adapun komponen-komponen APBD, diantaranya yaitu:

1. Pendapatan Asli daerah
2. Belanja daerah
3. Pembiayaan daerah

Menurut (Wahyuniar, 2017) Analisis kinerja anggaran dapat dilakukan dalam empat bagian yaitu:

1) Analisis Kinerja Pendapatan Daerah

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dengan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerjanya dapat dinilai baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi

pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh. Berdasarkan laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah dengan cara:

a. Analisis Anggaran Pendapatan Daerah

Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (favourable variance), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (unfavourable variance).

b. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu.

menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain. misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya.

2) Analisis Rasio Keuangan Daerah

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

c. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak

daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Sama halnya dengan analisis efisiensi PAD, untuk dapat menghitung rasio efisiensi pajak daerah diperlukan data tentang biaya pemungutan pajak.

d. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah.

2.1.5 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Idris (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua jenis pendapatan kas yang diperoleh daerah sehingga menambahkan kekayaan bersih pada suatu periode waktu tertentu dan tidak diwajibkan untuk dikembalikan atau dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dalam penelitian Fatimah dkk (2020), pendapatan asli daerah (PAD) diartikan sebagai perwakilan dari pendapatan yang telah diperoleh pemerintah daerah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan atau penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah, pendapatan tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan sumber daya daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menurut Anggoro (2017), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat daerah

setempat. Pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah terbesar yang digunakan dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan urusan pemerintahan daerah setempat untuk memajukan kesejahteraan daerah, sehingga perkembangan pembangunan suatu daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar potensi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh suatu daerah, maka tingkat pembangunan daerah juga semakin tinggi.

Sementara menurut Nasir (2019), pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai sumber pokok pendapatan daerah terbesar yang digunakan pemerintah daerah untuk mendanai urusan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah tersebut, seperti pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat daerah setempat. Pendapatan asli daerah (PAD) dapat diartikan sebagai setiap uang tunai yang diterima oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi terhadap kekayaan bersih daerah untuk jangka waktu yang telah ditentukan dan tidak wajib dikembalikan. Pendapatan tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi, pendapatan tersendiri dari pengelolaan sumber daya daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proporsi pendapatan asli suatu daerah terhadap Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) menunjukkan kemampuan atau tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah federal. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan otonomi daerah, yang memberikan daerah kekuasaan untuk mengatur urusannya sendiri. Pendapatan atau hasil daerah akan dipergunakan untuk mendanai program-program atau

kebijakan-kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta memenuhi kebutuhan dan/atau pengeluaran daerah. Keterkaitan antara belanja daerah dengan pendapatan harus positif, semakin kuat kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan maka alokasi belanja daerahnya pun semakin tinggi (Fatimah dkk 2020).

2.1.5.1 Komponen-Komponen Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa pendapatan Asli daerah (PAD) diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, Komponen-komponen PAD inilah yang menjadi sumber penerimaan daerah dan Perlu dikelola serta dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintahan daerah yang didukung dengan upaya dan regulasi peraturan daerah yang tepat.

1. Pajak Daerah

Menurut Siahan (2013: 7), secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tentang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat (disebut pajak negara) dan Pajak Daerah. Kemudian pemerintah daerah dibagi

lagi menjadi dua yaitu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutannya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang bukan kewenangannya Pajak pusat dipungut oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hanya bisa digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barng Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Bea Masuk dan Bea Keluar (pajak ekspor) dan Cukai (yang diklola oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan).

Pajak daerah mempunyai prinsip yang sama dengan pajak pusat, hanya saja pemungutannya ditetapkan pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Daerah Pemerintah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Semangat otonomi daerah di Indonesia memungkinkan setiap daerah provinsi atau kabupaten/kota mengatur daerahnya sendiri termasuk dalam bidang pajak dan retribusi daerah. Konsekuensinya adalah mungkin saja suatu jenis pajak dan retribusi dipungut di suatu daerah, tetapi tidak dipungut didaerah lainnya, selain itu

kalaupun dipungut pada berbagai daerah ternyata aturan yang dipakai tidak sama persis (Siahaan, 2013: 7). Menurut Feisly dalam Mardiasno (2009: 13) pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pajak Provinsi
2. Pajak Kabupaten/Kota

2. Retribusi

Menurut Yani (2002: 55), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembaaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa pelayanan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum.
2. Retribusi yang dikenakan Pada jasa usaha
3. Retribusi yang dikenakan pada perijinan tertentu

Retribusi dapat berpengaruh dalam hal distribusi pendapatan, karena retribusi dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi yang lemah dalam perekonomian dan membagikan beban masyarakat itu kepada kelompok berpenghasilan tinggi di daerah yang sama. Karena itu sistem retribusi yang

progresif dapat bermanfaat untuk redistribusi pendapatan dalam masyarakat di daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Menurut Darise (2009) jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN,
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak diperlukan secara angsur/cicilan.
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian besar
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

- h. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi
- i. Pendapatan hasil atas eksekusi atas jaminan
- j. Pendapatan dari pengembalian
- k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum

2.2 Jumlah Penduduk

2.2.1 Definisi Jumlah Penduduk

Penduduk adalah Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap Penduduk dan merupakan hasil dari proses proses demografi yaitu fertilitas ,moralitas dan migrasi menurut Irhamni dalam Said (2012 : 136). Penduduk dalam penelitian ini didefinisikan sebagai seluruh individu yang telah bertempat tinggal di suatu lokasi tertentu selama jangka waktu tertentu dan telah diverifikasi kepatuhannya terhadap peraturan dan perundang-undangan setempat sebagai akibat dari aktivitas demografi di wilayah tersebut.

Menurut Asmuruf, Makdalena F Rumate & Kawung (2015), penduduk adalah seluruh orang yang dibenarkan secara hukum yang berlaku mendiami suatu wilayah atau negara serta menuruti kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah dan negara tersebut. Menurut Oktiani (2021), penduduk merupakan total orang yang bermukim disuatu daerah pada suatu periode tertentu dan sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas demografi yaitu kesuburan, tabiat, dan pergerakan penduduk (migrasi).

Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal atau berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan dihitung dalam satuan jiwa. Dalam

setiap pembangunan suatu wilayah pastinya sangat diperlukan peran utama dalam pembangunan tersebut yaitu penduduk, dimana penduduk merupakan penggerak utama dalam mengelola sumber daya yang ada. Seperti negara Indonesia, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana perkembangan jumlah penduduk pertahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dan hal ini selalu dikaitkan antara kependudukan dengan pembangunan daerah. Penduduk memiliki peranan utama dalam sektor perekonomian yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka memiliki potensi untuk menghalangi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat (Pratiwi, 2022).

Revered Thomas Maltus pada tahun 1798 (Arsyad, 2004: 270) Mengemukakan teorinya tentang hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya yang berjudul *Essay on the Principle of Population*, ia Melukiskan konsep hasil yang menurun (Concept Of Dimishing Return) Maltus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu Negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua kali lipat setiap 30 -40 tahun. Semetara itu saat yang sama, karena Hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut derat hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dn tinggi.

Menurut Irhamni (Kuncoro 2015:17) dikalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa dan sumber daya manusia.

Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi. Pertama dari segi permintaan dan kedua dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk tidaklah selalu merupakan penghambat pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Yang artinya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan, yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumber daya perkapita akan menyebabkan penduduk lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.
2. Banyak negara yang penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktivitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya
3. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan

sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat.

Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi. Pertama dari segi permintaan dan kedua dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk tidaklah selalu merupakan penghambat pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Yang artinya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Apabila suatu daerah mempunyai jumlah penduduk yang dikit maka penduduk tidak akan mampu memanfaatkan sumber-sumbernya dengan efisiensi sebagaimana yang mungkin dihasilkan jika jumlah penduduknya besar (Rosyidi, 2012).

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor kependudukan, diantaranya adalah kelahiran (Natalitas), kematian (mortalitas) dan juga adanya (migrasi) penduduk (Christin, 2024) :

1. Kelahiran (Natalitas)

Faktor kelahiran memang merupakan faktor utama penyebab terjadinya pertumbuhan penduduk, bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh wilayah dunia.

2. Kematian (Mortalitas)

Kematian merupakan hilangnya tanda-tanda akan kehidupan manusia secara permanen. Kematian bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari faktor usia, jenis penyakit yang diderita, adanya pandemi, kondisi lingkungan sekitar, bencana alam, tempat domisili yang tidak memiliki sarana prasarana yang bisa menjadi pendukung kehidupan. Jika angka kematian bertambah, angka kependudukan pun akan berkurang, namun sebaliknya bila angka kematian menurun, secara otomatis akan menambah angka kependudukan, karena adanya jumlah kelahiran yang melonjak secara drastis.

3. Perpindahan (Migrasi)

migrasi adalah sebuah peristiwa berpindahnya suatu kelompok dari suatu daerah ke daerah lainnya. Pada beberapa kasus, perpindahan suatu kelompok disebabkan adanya alasan untuk bisa mencari dan mendapatkan sumber cadangan makanan yang baru. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kelangkaan yang juga diakibatkan oleh bertambahnya kepadatan penduduk.

Keterkaitan antara jumlah penduduk dengan PAD, yaitu besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan akan meningkat pula. Akan tetapi pertumbuhan penduduk tidak mempengaruhi pendapatan secara proposional. Artinya dalam setiap hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi, secara setiap daerah pasti memiliki masalah Kependudukan dan potensi yang berbeda-beda (Christin, 2024).

2.3. Inflasi

2.3.1 Definisi Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga Yang meningkat secara umum dan terus-menerus. Definisi lain mengatakan Bahwa inflasi merupakan suatu proses kenaikan Harga-harga yang berlaku dalam perekonomian. Kenaikan harga dari satu/dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Misalnya kenaikan harga menjelang hari raya atau yang terjadi satu kali dan tidak berdampak terhadap kenaikan sebagian besar harga barang-barang lain tidak disebut sebagai inflasi (Putri Sari, 2020).

Di dalam teori kuantitas dijelaskan bahwa sumber utama terjadinya inflasi adalah karena adanya kelebihan permintaan (*Demand*), sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin banyak. Kelebihan permintaan (*Demand*) tersebut disebabkan oleh jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sangat sedikit dan terjadi kelangkaan barang. Oleh karena jumlah barang yang sedikit dan terjadi kelangkaan barang tersebut, maka menyebabkan harga barang menjadi naik. Kenaikan harga yang terjadi pada negara-negara umumnya kerana disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Sukirno (2016) inflasi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Inflasi berdasarkan sumber atau penyebab terjadinya kenaikan harga

Inflasi biasanya dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi tarikan permintaan adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh pertambahan pengeluaran yang besar dan tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan produksi yang tersedia.

b) Inflasi Desakan Biaya

Inflasi tarikan biaya adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi sebagai akibat dari kenaikan bahan produksi atau kenaikan upah.

c) Inflasi Diimpor

Inflasi diimpor adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri.

2. Inflasi berdasarkan kepada tingkat kelajuan harga-harga yang berlaku. Inflasi biasanya dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a) Inflasi Merayap adalah inflasi yang terjadi pada tingkat 2%-4% per tahun.
- b) Inflasi Sederhana adalah inflasi yang terjadi pada tingkat 5%-9% pertahun.
- c) Hiperinflasi adalah inflasi yang terjadi pada tingkat $> 10\%$ - $> 100\%$ per tahun.

Secara garis ada tiga kelompok teori mengenai inflasi, masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses inflasi dan masing-masing bukan teori inflasi yang lengkap yang mencakup semua aspek penting dari proses kenaikan harga diantaranya:

1) Teori Kuantitas

Teori kuantitas adalah teori yang paling tua mengenai inflasi, teori ini menyoroti peran dalam proses inflasi dan jumlah uang beredar dan psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (*expenctations*). Inti dari teori ini adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar (apakah berupa penambahan uang kartal atau penambahan uang giral).
- b. Laju inflasi ditentukan oleh laju penambahan jumlah uang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga dimasa mendatang.

2) Teori Klasik

Teori ini berpendapat bahwa tingkat harga terutama ditentukan oleh jumlah uang beredar, yang dapat dijelaskan melalui hubungan antara nilai uang dan harga. Bila jumlah uang bertambah lebih cepat dari pertambahan barang maka nilai uang akan merosot dan ini sama dengan kenaikan harga. Jadi menurut klasik, inflasi berarti terlalu banyak uang beredar atau terlalu banak kredit dibandingkan dengan volume transaksi maka obatnya adalah membatasi jumlah uang beredar dan kredit.

3) Teori Keynes

Teori keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Teori ini menyoroti bagaimana perebutan rezki antara golongan-golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan agregat yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia (yaitu, apabila timbul *Inflationary Gap*). Selama *inflationary gap* tidak ada selama itu pula proses inflasi berkelanjutan. Teori ini menarik karena menyoroti peran sistem distribusi

pendapatan dalam proses inflasi dan menyarankan hubungan anatar inflasi dan faktor-faktor non ekonomis (Boediono, 2014).

2.3.2 Penyebab Inflasi

Menurut Prawoto (2019) penyebab terjadinya inflasi dapat di kategorikan ke dalam dua bagian, diantaranya:

- a. Inflasi Tarikan Permintaan adalah inflasi yang terjadi karena barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat terus mengalami peningkatan secara serius yang menyebabkan harga barang pada umumnya mengalami kenaikan seperti meningkatnya pembelanjaan dari rumah tangga atau perusahaan.
- b. Inflasi Dorongan Penawaran adalah inflasi yang terjadi karena meningkatnya ongkos produksi yang diperlihatkan dengan adanya tanda menurunnya produksi dan naiknya harga barang (meningkatnya harga barang mentah dari luar negeri dan naiknya harga bahan bakar). Menurut Naf'an (2014) inflas disebabkan oleh lima hal diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Tekanan dari sisi penawaran

Tekanan segi penawaran bisa diakibatkan karena kemerosotan nilai tukar, efek inflasi luar negeri terutama dari negara mitra perdagangan, kenaikan harga komoditas yang ditentukan oleh pemerintahan, dan terjadinya suatu musibah serta gangguan pendistribusian.

- 2) Tekanan dari sisi permintaan

Faktor-faktor yang menyebabkan inflasi permintaan adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang tinggi dibandingkan dengan persediaannya.

- 3) *Natural Inflation* dan *Human Error Inflation*

Inflasi alamiah adalah inflasi yang berlangsung karena terdapatnya sebab alamiah sehingga masyarakat tak mempunyai kekuatan dalam melawannya.

Human error Inflation adalah inflasi yang berlangsung diakibatkan oleh kesalahan oleh manusia itu sendiri.

4) *Spiralling Inflation*

Inflasi yang terjadi disebabkan karena inflasi yang ada pada tahun sebelumnya.

5) *Imported Inflation* dan *Domestic Inflation*

Inflasi yang terjadi di luar negara yang juga harus dialami oleh pemerintahan sendiri karena harus menjadi pengambil harga (*Price Taker*) di dalam pasar luar negeri.

Menurut Halim (2018) inflasi dibagi menjadi dua yaitu berdasarkan asalnya dan menurut besarnya cakupan pengaruh terhadap harga yaitu:

1. Menurut asalnya inflasi diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:
 - a. Inflasi dari dalam negara ialah inflasi yang terjadi sebab menurunnya anggaran belanja yang dibayar dengan metode pencetakan uang baru dan kegagalan pasar berimbang terhadap naiknya harga pangan.
 - b. Inflasi dari luar negara adalah inflasi yang terjadi sebab biaya barang yang masuk meningkat. Hal ini ada karena ongkos produksi luar negeri juga meningkat.
2. Menurut besarnya cakupan pengaruh terhadap harga dibagi kedalam tiga yaitu sebagai berikut:

- a. Inflasi tertutup adalah meningkatnya harga yang berlangsung hanya satu ataupun dua jenis barang saja.
- b. Inflasi terbuka yaitu meningkatnya harga yang berlangsung pada setiap barang secara umum.
- c. Inflasi yang tak dapat teratasi yakni apabila terjangan inflasi yang terjadi sangat hebat yang menyebabkan harga setiap waktu terus mengalami perubahan.

2.3.3 Dampak Negatif Inflasi

Menurut Prawoto (2019) akibat yang ditimbulkan inflasi dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Dampak kepada penghasilan

Terdapatnya masyarakat yang diuntungkan serta ada juga yang dirugikan sebab sifatnya yang tidak merata. Mereka yang merugi diakibatkan menurunnya penghasilan asli penduduk. Mereka yang mengalami untung ialah mereka yang ahli dalam memanfaatkan keadaan inflasi saat mengalami peningkatan dengan spekulasi yang dapat membuat penduduk mengalami kerugian yang besar.

2. Dampak Efisiensi

Pola distribusi faktor-faktor produksi terutama proses produksi dapat berubah karena pengaruh inflasi. Permintaan terhadap barang-barang khusus cenderung memberikan dampak pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan barang lainnya dimana meningkatnya produksi barang bisa membuat distribusi faktor produksi yang ada menjadi berubah.

3. Dampak kepada output

Naiknya inflasi mampu menurunkan daya beli penduduk yang mengakibatkan produksi menurun ataupun output juga ikut menurun. Tetapi jika dilihat dari waktu yang singkat efek dari naiknya inflasi karena produksi yang meningkat. Situasi seperti ini sering terjadi dengan tanda naiknya biaya barang lebih dulu baru setelah itu upah yang menjadi naik. Melalui cara ini pendapatan yang diperoleh perusahaan bisa meningkat serta dari keuntungan tersebut juga dapat menaikkan jumlah produksi barang.

Dalam jangka panjang inflasi tentu membuat daya beli dari masyarakat menurun serta output juga akan menurun. Menurut Naf'an (2014) efek yang ditimbulkan dari inflasi terbagi menjadi tiga bagian diantaranya adalah: pada pendistribusian penghasilan dan efisiensi pada total output tertentu tersebut:

- a. Inflasi mampu mengakibatkan naiknya produksi. Biasanya keadaan inflasi yang naiknya harga barang akan mendahului kenaikan upah dan menyebabkan produsen mengalami keuntungan.
- b. Jika laju inflasi sangat tinggi akan berimbas menurunnya jumlah dari produksi yang dihasilkan. Karena menurunnya nilai mata uang berdampak kepada penduduk yang tidak menyukai uang dalam bentuk tunai yang mengakibatkan terjadinya suatu pertukaran di antara barang terhadap barang lainnya.
- c. Efek inflasi terhadap pengangguran. Sebuah usaha jika ingin memberhentikan laju inflasi yang tinggi otomatis pengangguran juga akan tercipta.

- d. Efek inflasi terhadap perkembangan perekonomian. Tingginya laju inflasi tidak akan membantu berkembangnya suatu ekonomi sebuah negara. Harga yang meningkat terus akan menyebabkan proses produksi tidak produktif.
- e. Efek inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat Inflasi bisa memberikan dampak terhadap individu dan juga kelompok masyarakat yaitu:
 1. Menurunkan penghasilan riil penduduk yang berpenghasilan konsisten.
 2. Aset yang berwujud uang akan berkurang nilainya.
 3. Memburuknya proses aset yang dibagikan.

Menurut Hasyim (2016) inflasi memiliki beberapa konsekuensi masalah bagi individu, masyarakat, dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Karena itulah negara selalu mencari dan melaksanakan beberapa kebijakan agar dapat mencegah serta mampu untuk menghindarinya. Tingginya inflasi tidak membantu berkembangnya suatu perekonomian. Ketika harga terus meningkat maka kegiatan produksi menjadi tidak produktif. Para investor menggunakan uangnya dengan maksud untuk spekulatif seperti pembelian perumahan dan sebagainya.

Hal ini menyebabkan penginvestasian yang menguntungkan menjadi turun sehingga aktivitas ekonomi juga ikut mengalami penurunan serta pengangguran akan tercipta. Kenaikan harga akan berdampak buruk pada perdagangan. Ekspor mengalami penurunan volume dan tidak mampu berkompetisi di pasar mancanegara. Di lain sisi harga produk di negara meningkat dan impor menjadi lebih murah. Sebab jumlah impor melebihi jumlah ekspor maka cadangan devisa akan menjadi menurun serta memburuknya neraca pembayaran. Salah satu

konsekuensinya adalah inflasi cenderung mengurangi kemakmuran perorangan ataupun penduduk. Para pekerja yang bergaji tetap (pelaku ekonomi).

2.3.4 Solusi Mengatasi Inflasi

Menurut Prawoto (2019) Banyak cara negara menyelesaikan inflasi, dapat berbeda-beda sebab pemicu terjadinya pada tiap-tiap negara tidaklah sama. Metode dalam mengatasinya bisa dilaksanakan dengan menerapkan suatu kebijakan diantaranya:

1. Kebijakan Moneter

Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk lebih fokus pada total peredaran uang. Inflasi dikendalikan oleh Bank Sentral dengan cara meningkatkan cadangan minimum agar jumlah uang yang beredar menjadi lebih kecil sehingga tingkat inflasi mampu untuk ditekan. Bank Indonesia (BI) mengelola inflasi saat ini melalui metode pengelolaan yang disebut *Inflation Targeting Framework (ITF)* yang menentukan tingkat suku bunga *BI Rate* yang ditetapkan setiap awal bulan.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal meliputi segi pengeluaran negara dan pajak yang secara langsung bisa mempengaruhi suatu harga, terkait peraturan mengenai pengeluaran pemerintahan negara, mengurangi permintaan total dan menekan laju inflasi merupakan kebijakan fiskal yang diterapkan.

3. Kebijakan yang berhubungan dengan output

Total output yang selalu naik dapat dicapai karena ada sebuah kebijakan yang mampu membuat bea masuk turun yang mengakibatkan biaya impor

meningkat dan biaya barang jadi menurun. Sehingga naiknya output mampu memperlambat lajunya Inflasi. Operasi pasar terbuka adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam jangka pendek yaitu lewat lembaga pangan (BULOG) agar bisa menyediakan barang-barang kebutuhan yang ada.

4. Kebijakan Penetapan Harga dan *Indexing*

Terjadinya kebijakan ini sebab penentuan biaya yang tinggi untuk harga produk tertentu dan indikator ongkos untuk upah dan gaji. Menurut Karya & Syamsudidin (2017) kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi ada tiga yaitu sebagai berikut:

5. Kebijakan Fiskal (Perpajakan)

Kebijakan fiskal terdiri dari langkah-langkah pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan dalam segi perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan memengaruhi pengeluaran aggregate dalam ekonomi.

6. Kebijakan keuangan

Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan negara yang dilaksanakan lewat Bank Indonesia dengan tujuan agar bisa mengatur peredaran uang di suatu perekonomian yang dapat memengaruhi pengeluaran aggregate.

7. Kebijakan Non-Kuangan atau segi penawaran

Kebijakan fiskal dan moneter lebih berfokus dalam hal mengendalikan pengeluaran agregate. Oleh sebab itu kebijakan fiskal dan moneter disebut

juga kebijakan sisi permintaan. Sedangkan non-moneter lebih ditekankan pada kebijakan sisi penawaran yang tujuannya ialah untuk meninggikan efisien aktivitas suatu perusahaan supaya mampu melakukan penawaran terhadap produknya dengan harga yang lebih terjangkau dan kualitas yang juga bagus.

2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.4.1 Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah atau regional tertentudan dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomiyang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalamikemajuan dalam perekonomian (Himawan, 2016). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usahadalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkanoleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkannilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun

2.4.2 Produk Domestik Bruto Riil dan Produk Domestik Bruto Nominal

Produk Domestik Bruto mengukur total pembelanjaan barang dan jasa secara keseluruhan di suatu negara dan pada periode tertentu (Mankiw, 2016). Total

pembelanjaan yang meningkat berarti perekonomian menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dan atau penjualan barang dan jasa dengan harga yang lebih tinggi. Penyebab naiknya jumlah Produk Domestik Bruto yang disebabkan oleh dua hal tersebut, maka para ekonomi memisahkan kedua pengaruh tersebut untuk mengetahui jumlah peningkatan produksi barang dan jasa yang tidak dipengaruhi oleh peningkatan harga jual dan barang tersebut. Mankiw (2016) menjelaskan “Produk Domestik Bruto nominal adalah produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga-harga di masa sekarang dan Produk Domestik Bruto riil adalah produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga-harga tetap”. Pengukuran Produk Domestik Bruto riil untuk menilai produksi barang dan jasa pada harga tetap dengan menentukan satu tahun untuk dijadikan tahun pokok dan akan dikalikan dengan jumlah produksi barang dan jasa di tahun-tahun berikutnya.

2.4.3 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara tanpa memperhatikan factor produksi residen maupun non residen. Sedangkan Maryam (2019) menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. PDB suatu negara dihitung berdasarkan oleh nilai-nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari seluruh wilayah di negara tersebut. Menurut Sukirno Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun disuatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan factor produksi, tapi

lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu. Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto dapat dilakukan melalui tiga pendekatannya itu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, serta dapat menggambarkan struktur perekonomian. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Dalam website resmi Badan Pusat Statistik, ada 3 pendekatan yang dilakukan untuk menyusun produk domestik regional bruto yaitu:

1. Menurut Pendekatan Produksi

Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah atau wilayah suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun, diakumulasikan untuk membentuk produk domestik regional bruto (PDRB).

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

Total imbalan jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Imbalan jasa ini mencakup: a. Upah dan Gaji. b. Sewa Tanah. c. Bunga Modal

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai produk barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan di suatu daerah yang digunakan untuk konsumsi akhir atau seluruh komponen permintaan akhir. Yaitu:a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlabab. Pengeluaran konsumsi pemerintahc. Pembentukan modal tetap domestik brutod. Perubahan inventori, dane. Ekspor Neto (Ekspor Neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Ketiga pendekatan tersebut secara konseptual menciptakan hasil angka yang serupa, dimana jumlah barang dan jasa akhir akan serupa dengan jumlah pengeluaran yang dihasilkan dan juga sama dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. Berdasarkan harga berlaku dan harga konstan (riil), ketiganya ditampilkan. Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang diperkirakan menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun berjalan (Badan Pusat Statistik), Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia,2022).

Badan Pusat Statistik juga menjelaskan kegunaan dari menghitung nilai Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku (nominal) menggambarkan kemampuan sumber daya atau kekayaan ekonomi di suatu

daerah. Semakin besar nilai Produk Domestik Regional Bruto maka semakin besar juga kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah.

2. Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan (riil) menggambarkan kemajuan dari pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh atau setiap kategorinya dari tahun ketahun.
3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku menurut lapangan usaha menggambarkan bentuk struktur ekonomi atau kegunaan dari setiap kategori ekonomi di daerah.
4. Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai Produk Domestik Bruto dan Produk Neto Bruto per kapita.
5. Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga konstan menggambarkan pertumbuhan perekonomian per orang penduduk di suatu wilayah secaranyata.

2.4.4 Faktor-Faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Sukirno (2019), PDRB suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Tenaga Kerja
 Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang berperan langsung dalam menghasilkan barang dan jasa. Jumlah dan kualitas tenaga kerja yang memadai akan meningkatkan produktivitas dan output daerah, sehingga berpengaruh positif terhadap PDRB.

2. Modal

Modal mencakup peralatan produksi, mesin, dan sarana pendukung lainnya.

Peningkatan akumulasi modal memungkinkan proses produksi berjalan lebih efisien dan dalam skala yang lebih besar, yang pada akhirnya meningkatkan PDRB.

3. Sumber Daya Alam

Ketersediaan sumber daya alam menjadi faktor penting dalam menentukan struktur dan besarnya PDRB, khususnya bagi daerah yang sektor ekonominya bertumpu pada sektor primer.

4. Teknologi

Kemajuan teknologi berperan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas faktor-faktor produksi. Penggunaan teknologi yang lebih modern memungkinkan peningkatan output tanpa harus menambah jumlah input secara signifikan.

5. Peran Pemerintah

Kebijakan dan pengeluaran pemerintah, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, dapat mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan PDRB daerah.

2.4.5 Kebijakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi. PDRB mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa selama periode tertentu, sehingga menjadi dasar

dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan yang berkaitan dengan PDRB diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan sektor-sektor produktif, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Selain itu, pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan PDRB melalui kebijakan fiskal, seperti pengelolaan belanja daerah yang efektif dan tepat sasaran, khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan efisiensi kegiatan ekonomi. Di sisi lain, kebijakan PDRB juga mencakup upaya pemerataan pembangunan antarwilayah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada daerah tertentu, tetapi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, kebijakan PDRB tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi daerah, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.5 Hubungan Antar Variabel

2.5.1 Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal atau berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan dihitung dalam satuan jiwa. Dalam setiap pembangunan suatu wilayah pastinya sangat diperlukan peran Utama dalam pembangunan tersebut yaitu penduduk, dimana penduduk Merupakan penggerak utama dalam mengelola sumber daya yang ada. Seperti Negara indonesia, indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana Perkembangan jumlah penduduk

pertahun nya selalu mengalami peningkatan Yang cukup tinggi, dan hal ini selalu dikaitkan antara kependudukan dengan Pembangunan daerah (Miragustia, 2010).

Keterkaitan antara jumlah penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah, yaitu besarnya Pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk Meningkat maka pendapatan akan meningkat pula. Akan tetapi pertumbuhan Penduduk tidak mempengaruhi pendapatan secara proposional. Artinya dalam Setiap hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah (Miragustia, 2010).

2.5.2 Hubungan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan penghasilan penduduk juga harus dibersamaan dalam hal penyediaan barang dan jasa. Apabila harga untuk barang serta jasa meningkat secara berkelanjutan maka mengakibatkan terjadinya inflasi. Hal ini bisa berimbas langsung terhadap keadaan ekonomi sebuah negara serta bisa menurunkan kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak (Saputra, Sudjana & Djudi, 2014). Dari situasi ini negara di minta untuk dapat menstabilkan ekonomi yang ada pada sebuah wilayah atau negara dengan cara inflasi harus tetap terjaga di tingkat yang kecil/rendah supaya nantinya pajak daerah yang diterima bisa lebih maksimal.

Adanya inflasi akan berimbas terhadap penurunan daya beli penduduk dan mengakibatkan naiknya tarif produksi perusahaan. Naiknya tarif produksi mampu mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang di peroleh oleh perusahaan. Sebab pendapatan yang diterima perusahaan berkurang otomatis pajak yang diterima dan sudah dipungut oleh pemerintah pada perusahaan itu juga berkurang. Tingkat inflasi

sangat mempengaruhi pajak daerah yang diterima sebab jika inflasi naik maka pajak yang diterima daerah akan menurun. Dengan terjadinya inflasi yang tinggi nantinya mengakibatkan hambatan pada pendapatan daerah, bukan itu saja inflasi juga mengakibatkan tingkat produktifitas perekonomian, namun inflasi rendah akan memberikan dampak yang baik terhadap pendapatan asli daerah (Siti, 2024).

2.5.3 Hubungan variabel PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pendapatan suatu daerah yang selanjutnya digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Tingkat kesejahteraan masyarakat pada daerah yang dimaksud berupa upah atau gaji yang diterima oleh masyarakat tersebut atas jasa yang telah diberikan masyarakat tersebut dalam sektor produksi. Hubungan PDRB terhadap daerah mempunyai dampak positif yang disebabkan adanya dampak aktifitas perekonomian dalam sektor ekonomi di daerah. Jika aktifitas ekonomi pada sektor itu terjadi kenaikan, berpengaruh terhadap besaran PAD daerah, karena beberapa sektor domestik dapat digunakan untuk mengukur atau mengestimasi pada peningkatan pendapatan asli daerah secara langsung, menyimpulkan setiap adanya kenaikan PDRB maka akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD didalam pemerintah daerah (Demitianus, 2018).

2.6 Penelitian Terdahulu

Nur (2022), Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Inflasi, Penduduk Produktif Dan Pengeluaran Pemerintahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Kabupaten Ekonomi

Sebagai Variabel Intervening Kabupaten Bulukumba. menggunakan analisis regresi dengan variabel intervening untuk melihat pengaruh dari inflasi, penduduk produktif, dan pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta bagaimana pengaruh tersebut dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi.

Ni Nengah, (2022). Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Jumlah Penduduk, dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah provinsi NTB tahun 2010-2022. Metode analisis data panel dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan Eviews 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio* berpengaruh positif tetapi signifikan terhadap return saham. Sementara itu, *Return on Asset* menunjukkan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham.

Yeny (2014), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini : PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah di kabupaten eks Karisidenan Pati. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah di kabupaten eks Karisidenan Pati. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah di kabupaten eks Karisidenan Pati.

Rahmawati, (2024), peneliti melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Jumlah Penduduk & Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Surabaya Tahun 2013-2022. Metode penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pada uji t menyatakan bahwa variabel 1 yaitu jumlah penduduk tersebut memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya, sedangkan variabel 2 yaitu inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya. Dan pada hasil uji f menyatakan bahwa kedua variabel independen berpengaruh pada variabel dependen.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariska Oktiani (2021). Mengenai Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Metode digunakan adalah kuantitatif, dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa Jumlah Penduduk dan Inflasi Berpengaruh Positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis koefisien determinasi diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0,977. Hal ini menunjukkan kontribusi persentase pengaruh jumlah penduduk (X_1) dan inflasi (X_2) terhadap naik turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 97,70%, sedangkan sisanya sebesar 2,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Dimas (2020), melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012-2018. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini : PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli

Daerah di kabupaten eks Karisidenan Pati. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah di kabupaten eks Karisidenan Pati. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah di kabupaten eks Karisidenan Pati.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman Suleman, Abdurrozzaq Hasibuan (2021). Mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di kota Padangsidimpuan. Metode digunakan adalah kuantitatif, dengan sumber data yang Digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kemiskinan di Kota Padangsidimpuan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,287, hal ini menyatakan bahwa Setiap penambahan 1% tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padangsidimpuan maka akan Menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 28,7% dan begitu juga sebaliknya

Penelitian yang dilakukan oleh Demitianus (2018). Mengenai Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan per Kapita, PDRB terhadap PAD di kabupaten Mimika Provinsi Papua. Model analisis yang digunakan yakni dengan Metode Analisis Regresi Berganda dengan Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial jumlah penduduk memiliki pengaruh yang bersifat negatif terhadap PAD artinya jika jumlah penduduk meningkat maka PAD akan mengalami penurunan demikian sebaliknya, sedangkan PDRB ADHB tidak memiliki pengaruh terhadap PAD.

Secara simultan atau bersama-sama, jumlah penduduk dan PDRB ADHB tidak memiliki pengaruh terhadap PAD.

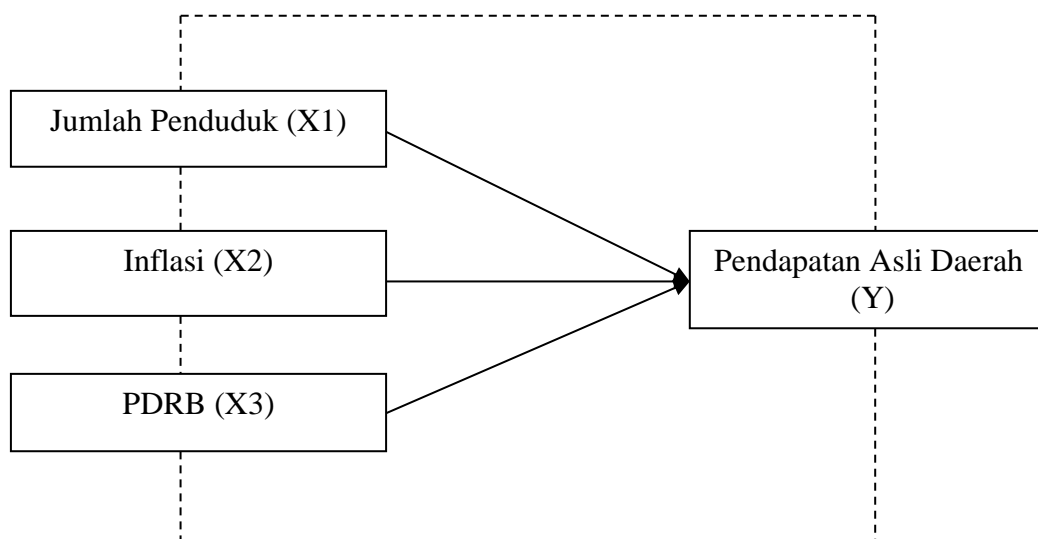
Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rumsyah Rahmawati, Mohammad Wahid, Pramana Yoga Kusuma (2024). Mengenai Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah dikota Surabaya tahun 2013-2022. Metode yang dipakai untuk penelitian ini yaitu metode analisis kuantitatif. Pada penelitian ini telah didapatkan hasil pada uji t menyatakan bahwa variable 1 yaitu jumlah penduduk tersebut memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya, sedangkan untuk variable 2 yaitu inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Surabaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Sari MJ Silaban, Stevi Jesica Siagian (2020). Mengenai Pengaruh Inflasi dan investasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2002-2019. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi secara parsial memperoleh nilai t sebesar 2,142 dan nilai signifikansi $0,049 < 0,05$ yang artinya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka yang artinya semakin tinggi inflasi maka pengangguran terbuka semakin tinggi. Investasi secara parsial memperoleh nilai t sebesar -3,529 dan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ yang artinya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka yang artinya semakin tinggi investasi maka pengangguran terbuka akan menurun.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Dalam penelitian ini memiliki 4 variabel penelitian. Variabel yang mempengaruhi yaitu Jumlah Penduduk (X_1), Inflasi (X_2), PDRB (X_3), sedangkan Pendapatan Asli Daerah (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—————> : Secara Parsial

-----> : Secara Simultan

2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu kalimat yang menunjukkan dugaan sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan sehingga tingkat kebenarannya masih lemah (Sugiyono 2016: 64). Berdasarkan kerangka pikir penelitian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga Jumlah Penduduk (X_1), Inflasi (X_2), Produk Domestik Regional Bruto (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2024.